

**KOLEKSI PERUNDANG - UNDANGAN
PUSAT HUKUM & HUMAS**

**LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH**

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
 NOMOR : 5
 TAHUN : 2012

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Sebagai Ketua Pelaksana	1
Lampiran II	Laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	3
Lampiran IIIA	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat	4
Lampiran IIIB	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat	6
Lampiran IV	Peta Bidang Tanah	8
Lampiran V	Daftar Nominatif	9
Lampiran VIA	Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah (<i>Peta Bidang Tanah</i>)	11
Lampiran VIB	Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (<i>daftar nominatif</i>).....	12
Lampiran VII	Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah.....	13
Lampiran VIII	Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif	14
Lampiran IX	Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi	15
Lampiran XA	Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Penilai dan Alokasi Waktu Seleksi Sederhana	16
Lampiran XB	Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Penilai dan Alokasi Waktu Seleksi Umum	17
Lampiran XI	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Kepada Penilai	18
Lampiran XII	Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah	19
Lampiran XIII	Surat Kuasa	20
Lampiran XIV	Berita Acara Kesepakatan	21
Lampiran XV	Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah/Pengganti/Permukiman Kembali/Saham/ Bentuk Lain	23

Lampiran XVI	Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang	24
Lampiran XVII	Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang	25
Lampiran XVIII	Berita Acara Pelepasan Hak	26
Lampiran XIX	Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti/Permukiman Kembali	27
Lampiran XX	Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti/Permukiman Kembali *) dari	28
Lampiran XXI	Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham	29
Lampiran XXII	Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham dari	30
Lampiran XXIII	Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain	31
Lampiran XXIV	Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Lain	32
Lampiran XXV	Surat Permohonan	33
Lampiran XXVI	Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus	34
Lampiran XXVII	Berita Acara Pemberian Sisa Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus	35
Lampiran XXVIIIA	Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan Ke Pengadilan	36
Lampiran XXVIIIB	Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	37
Lampiran XXVIIIC	Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya	38
Lampiran XXVIIID	Berita Acara Pihak Yang Berhak Telah Diundang Secara Patut Tidak Hadir Dan Tidak Memberikan Kuasa	39
Lampiran XXVIIIE	Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Sedang Menjadi Objek Perkara di Pengadilan	40
Lampiran XXVIIIF	Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya	41
Lampiran XXVIIIG	Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Diletakan Sita Oleh Pejabat Yang Berwenang	42
Lampiran XXVIIIH	Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Menjadi Jaminan di Bank atau Jaminan Hutang Lainnya	43
Lampiran XXIX	Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian	44

Lampiran XXX	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah	45
Lampiran XXXI	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang Dititipkan di Pengadilan	46
Lampiran XXXII	Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang Merupakan Milik atau Dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	47
Lampiran XXXIII	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Merupakan Milik Atau Dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	48
Lampiran XXXIV	Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum	49
Lampiran XXXV	Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Terhadap Aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Kas Desa	50
Lampiran XXXVI	Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	51
Lampiran XXXVII	Surat Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian	52

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

TENTANG

PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI,

Menimbang : bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah(nama kegiatan pengadaan tanah);

Mengingat : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TENTANG PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH.

KESATU : Menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.....(nama kegiatan pengadaan tanah).

KEDUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- KETIGA : Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain meliputi:
- a. penyiapan pelaksanaan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. pemberian ganti kerugian;
 - f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - g. penitipan ganti kerugian;
 - h. pelepasan objek pengadaan tanah;
 - i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - k. penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KEEMPAT : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran (*Instansi yang memerlukan tanah*) tahun (*tahun berjalan*).

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi

ttd

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota
4. (*Instansi yang memerlukan tanah*);
5. (*Instansi terkait*).

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

LAPORAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
TENTANG PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....
PENGADAAN TANAH.....(*nama kegiatan pengadaan tanah*)

....., tanggal.... bulan.... tahun.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth. Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
di
J a k a r t a.

Dengan hormat bersama ini dilaporkan bahwa berdasarkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
..... Nomor tanggal kami telah menugaskan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah (*nama kegiatan
pengadaan tanah*) yang berlokasi di Kabupaten/Kota
seluasm² atas permohonan:
(*Instansi yang memerlukan tanah, fotocopy keputusan penugasan terlampir*).

Demikian untuk menjadi pemeriksaan.

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi

ttd

.....
NIP.

Tembusan :
..... (*Instansi yang memerlukan tanah*)

LAMPIRAN IIIA
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH
..... (*nama kegiatan pengadaan tanah*)
DAN SEKRETARIAT

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah (*nama kegiatan pengadaan tanah*) dan Sekretariat;

Mengingat : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH (*nama kegiatan pengadaan tanah*) DAN SEKRETARIAT.

KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah (*nama kegiatan pengadaan tanah*) dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan paling kurang sebagai berikut:

a. Pelaksana Pengadaan Tanah

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua;
2. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota;
3. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai Anggota;
4. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau yang ditunjuk sebagai Anggota;
5. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota;

6. Camat ...

6. Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
7. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan
8. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

b. Sekretariat.

1.
2.
3.
4.

- KEDUA : Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling kurang:
- a. penyiapan pelaksanaan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. pemberian ganti kerugian;
 - f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - g. penitipan ganti kerugian;
 - h. pelepasan objek pengadaan tanah;
 - i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - k. penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KETIGA : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran (*Instansi yang memerlukan tanah*), Tahun..... (*tahun berjalan*).

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi

ttd

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota
4. (*Instansi yang memerlukan tanah*);
5. (*instansi terkait*).

LAMPIRAN IIIB
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH
..... (*nama kegiatan pengadaan tanah*)
DAN SEKRETARIAT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : bahwa sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Nomor ... tanggal ... tentang
Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ..., sehingga
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah
..... (*nama kegiatan pengadaan tanah*) dan
Sekretariat;

Mengingat : 1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Tambahan Lembaran
Negara Nomor);
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Nomor Tanggal tentang
Keputusan Penugasan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ... sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan
Tanah (*nama kegiatan pengadaan tanah*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA TENTANG SUSUNAN
KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH
(*nama kegiatan pengadaan tanah*) DAN SEKRETARIAT.

KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan
Tanah (*nama kegiatan pengadaan tanah*) dari
Sekretariat dengan susunan keanggotaan paling kurang
sebagai berikut:

a. Pelaksana Pengadaan Tanah

1. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;
2. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau
pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai
Anggota;
3. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon IV
yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota;
4. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai
Anggota;

5. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan
6. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

b. Sekretariat.

1.
2.
3.
4.

- KEDUA** : Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, paling kurang:
- a. penyiapan pelaksanaan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. pemberian ganti kerugian;
 - f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - g. penitipan ganti kerugian;
 - h. pelepasan objek pengadaan tanah;
 - i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - k. penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KETIGA** : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran Instansi yang memerlukan tanah ... (tahun berjalan).

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

ttd

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Gubernur Provinsi;
3. Kepala Kantor Wilayah Provinsi;
4. Bupati/Walikota;
5. (Instansi yang memerlukan tanah);
6.(Instansi terkait).

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

PETA BIDANG TANAH

..... (*nama kegiatan pengadaan tanah*)

Nomor

Contoh Peta Bidang skala 1 : 1.000 (atau sesuai kebutuhan)

Untuk pembuatan/pengesahannya,

....., tanggal.....bulan....tahun...

Satgas A
Ketua

Cap dan ttd,

.....

LAMPIRAN VIA
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
DATA FISIK PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN
PEMANFAATAN TANAH
(Peta Bidang Tanah)

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, Ketua Satgas A telah melaksanakan inventarisasi dan
identifikasi data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah yang berjumlah bidang dan lembar peta,
terkait dengan Pengadaan Tanah
.....

Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah ini meliputi kegiatan
pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dengan rekam kegiatan
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Yang menyerahkan,
Satgas A
Ketua

Cap dan ttd.

Cap dan ttd.

.....
NIP

.....
NIP

KOLEKSI PERUNDANG - UNDANGAN
PUSAT HUKUM & HUMAS

LAMPIRAN VIB
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
DATA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH
(Daftar Nominatif)
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, Ketua Satgas B telah melaksanakan inventarisasi dan
identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang
berjumlah bidang, terkait dengan Pengadaan Tanah
..... (nama kegiatan pengadaan tanah).

Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah ini kegiatan
pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang
terletak di:

Desa/Kelurahan:

- a.,
 - b.,
 - c.dst.
- Kecamatan.....

Desa/Kelurahan:

- a.,
 - b.,
 - c.dst.
- Kecamatan.....dst.

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam
bentuk Daftar Nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Yang menyerahkan,
Satgas B
Ketua

Cap dan ttd.

Cap dan ttd.

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF
PENGADAAN TANAH
(Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012)

Nomor

"Lampiran Pengumuman ini:

1. Peta Bidang Tanah; dan
2. Daftar Nominatif."

Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisi dan identifikasi dimaksud, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini.

....., tanggal bulan tahun.....

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
PETA BIDANG TANAH DAN/ATAU DAFTAR NOMINATIF

Nomor....

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, Ketua Satgas telah melaksanakan verifikasi dan perbaikan
terhadap keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah
dan/atau daftar nominatif Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah
.....

I. Terhadap Peta Bidang Tanah

No.	Pihak yang Berhak	NIB./ Nomor Bidang	Luas Semula (m ²)	Luas Hasil Verifikasi dan Perbaikan (m ²)	Keterangan
1.					
2.					
dst.					

II. Terhadap Daftar Nominatif

No.	Pihak yang Berhak	NIB./ Nomor Bidang	Data Semula	Data Hasil Verifikasi dan Perbaikan	Keterangan
1.					
2.					
dst.					

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi ini
dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal bulan tahun

Pelaksana Pengadaan Tanah,
Ketua

.....
NIP

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PENOLAKAN KEBERATAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
Nomor

Sehubungan dengan keberatan atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang diajukan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal, bulan....., tahun....., oleh Pihak yang Berhak, yaitu :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK/Identitas diri lainnya :
atas Luas Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang berlokasi di :
Desa /Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Lembar Peta :
N I B/Nomor Bidang Tanah :

Keberatan yang diajukan meliputi :

1.
2.
3. dst.

Dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Telah dilakukan verifikasi data lapangan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas(satgas A dan/atau satgas B) dengan hasil(hasil verifikasi).
2. Hasil verifikasi dimaksud pada angka 1, menyimpulkan bahwa alasan keberatan yang diajukan tidak benar.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyatakan menolak keberatan yang diajukan Pihak yang Berhak.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., tanggal....bulan....tahun.....

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd

.....
NIP.

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
PENGADAAN TANAH.....
KEPADA PENILAI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., sehubungan dengan surat Saudara Penilai
tanggal Nomor Perihal Permintaan Data, telah diserahkan
kepada Penilai hasil inventarisasi dan identifikasi dan/atau hasil verifikasi dan
perbaikan inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan oleh Satgas A
dan Satgas B (peta bidang dan daftar nominatif terlampir).

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi
dan/atau Hasil Verifikasi dan Perbaikan Inventarisasi dan Identifikasi ini
dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Penilai

Yang menyerahkan,
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

Cap dan ttd

.....

.....

NIP

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN
PENGADAAN TANAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, Penilai (*nama Penilai*) Pengadaan
Tanah (*nama kegiatan pengadaan tanah*)
menyerahkan hasil penilaian obyek pengadaan tanah yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
 - b.,
 - c.dst.
- Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
 - b.,
 - c.dst.
- Kecamatan.....dst.

Penilaian ganti kerugian pengadaan tanah ini dilakukan bidang per
bidang tanah, meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

dengan hasil penilaian bidang per bidang tanah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd

.....
NIP

Yang menyerahkan,
Penilai Pengadaan Tanah

Cap dan ttd

.....

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

SURAT KUASA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

- II. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :
No. KTP :

selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Dengan ini Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Penerima Kuasa

KHUSUS

Untuk mewakili dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, atas
Bidang Tanah yang berlokasi di :

1. Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Lembar Peta :
N I B / Nomor Bidang :
Luas : m²

2. Dst.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa

ttd

Materai
cukup

Penerima Kuasa

ttd

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
KESEPAKATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun telah dilakukan musyawarah bentuk Ganti Kerugian
Pengadaan tanah (nama kegiatan pengadaan tanah) yang berlokasi di:

1. Desa /Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

2. Desa /Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

3. dst

antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan hasil
sebagai berikut:

I. PIHAK YANG SETUJU

Bentuk Ganti Kerugian

- Uang, sebanyak orang, nama dan besarnya nilai ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai tanah pengganti seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai permukiman kembali seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai kepemilikan saham seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- Bentuk lain berupa,
sebanyak orang, nama dan bentuk
nilai, seperti tersebut dalam daftar
terlampir.

II. PIHAK YANG TIDAK SETUJU

Bentuk Ganti Kerugian

- Uang, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir.
- Bentuk lain berupa,
sebanyak orang, nama dan bentuk

nilai, seperti tersebut dalam daftar terlampir.

III. PIHAK YANG TIDAK HADIR DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA

III. PIHAK ...

No.	Nama	No. Urut	Alamat	Letak Tanah	Luas	Ket.
1						
2						
3						
dst.						

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Urut.	PIHAK YANG BERHAK		Bentuk Ganti Kerugian	PELAKSANA PENGADAAN TANAH
	Yang setuju	Yang tidak setuju		
1.	ttd nama	ttd nama		Ketua ttd nama
2.	ttd nama	ttd nama		Sekretaris ttd nama
3.	ttd nama	ttd nama		Anggota ttd nama
4.	ttd nama	ttd nama		Anggota ttd nama
dst.				

KOLEKSI PERUNDANG - UNDANGAN
PUSAT HUKUM & HUMAS

LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

VALIDASI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG/TANAH
PENGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI/SAHAM/BENTUK LAIN

....., tanggal bulan.... tahun ...

Nomor :
Lampiran :
Hal : Validasi

Yth. (Instansi yang memerlukan tanah)
di

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang/tanah pengganti/permukiman kembali/saham/bentuk lain kepada Pihak yang Berhak dalam pengadaan tanah, yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....
2. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....dst.

dengan ini kami Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, memberikan Validasi Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang menerima Ganti Kerugian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	Nomor Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan Luas Tanah Yang Dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Bentuk Ganti Kerugian (Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Saham/Bentuk lain)
1.					
2.					
3.					
dst.					

Demikian Validasi Pemberian Ganti Kerugian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua
cap dan ttd

.....
NIP.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN	
NOMOR	ASLI
Sudah terima dari : (Instansi yang memerlukan tanah)	
Banyaknya uang :	(dengan huruf)
Untuk pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif dan NIB seluas m ²	
Terbilang. Rp.	
..., tanggal ... bulan ... tahun ...	
Materai Cukup	ttd Pihak yang Berhak

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian Pengadaan
Tanah(nama kegiatan pengadaan
tanah) yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.
b.
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.
b.
c.dst.
Kecamatan.....dst.

Dengan daftar Pihak yang Berhak yang menerima Ganti Kerugian
sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan Luas tanah yang dilepaskan	Besarnya nilai ganti kerugian (Rp)	Ket.
1					
2					
3					
dst.					

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang
ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

.....(Instansi yang
memerlukan tanah

ttd.

1.

Cap dan ttd.

ttd.

2.

.....
NIP.

3. dst.....

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PELEPASAN HAK
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, hadir dihadapan saya(nama) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak atas sebidang tanah luasm², terletak di desa/keurahan, kecamatan ..., kabupaten/kota ..., provinsi ...

Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas obyek pengadaan tanah (terlampir) kepada pelaksana pengadaan tanah, dan telah menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp...../Tanah Pengganti...../Permukiman Kembali /Kepemilikan Saham

Sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin bahwa:

- atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara;
- tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan/tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun;
- tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan
- tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut.

Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/pelepasan hak ini.

Demikian pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat dalam daftar No. ...
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

Cap dan ttd.

.....
NIP

Pihak yang Berhak

Materai
Cukup

ttd

.....

LAMPIRAN XIX
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK
TANAH PENGGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI

TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI	
NOMOR	ASLI
Sudah terima dari : (<i>Instansi yang memerlukan tanah</i>)	
Dalam bentuk tanah pengganti/permukiman kembali :	
1. letak/lokasi	:
a. desa/kelurahan	:
b. kecamatan	:
c. kabupaten/kota	:
d. provinsi	:
2. luas	: m ² (..... meter persegi)
3. batas-batas	:
a. Utara	:
b. Timur	:
c. selatan	:
d. barat	:
Untuk pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif seluas m ² yang senilai dengan Rp.(terbilang)	
..., tanggal ... bulan ... tahun ...	
Materai Cukup	ttd Pihak yang Berhak

LAMPIRAN XX
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI
/PERMUKIMAN KEMBALI*) DARI (INSTANSI YANG MEMERLUKAN
TANAH) KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH.....

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, telah dilaksanakan penyerahan Ganti Kerugian dalam
bentuk tanah pengganti/permukiman kembali*) dari (instansi yang
memerlukan tanah) kepada pihak yang berhak sesuai dengan hasil validasi
nomor..... tanggal..... dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Dengan daftar Pihak yang Berhak dan Tanah Pengganti/Permukiman
Kembali*) sebagai berikut:

No.	Pihak Yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan luas Tanah yang Dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Lokasi Tanah Pengganti/ Permukiman Kembali*)	Luas (m ²)	Ket.
1							
2							
dst.							

Demikian Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam Bentuk Tanah
Pengganti/Permukiman Kembali*) ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak	 (Instansi yang memerlukan tanah)
ttd.	
1.	Cap dan ttd.
ttd.	
2.	NIP.
3. dst.....	

LAMPIRAN XXI
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK SAHAM

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN	
NOMOR	ASLI
Sudah terima dari : (Instansi yang memerlukan tanah)	
Banyaknya Saham	(dengan huruf)
Untuk pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif dan NIB seluas m ²	
Terbilang. Rp.	
..., tanggal ... bulan ... tahun ...	
Materai Cukup	ttd Pihak yang Berhak

LAMPIRAN XXII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK SAHAM
DARI(INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)
KEPADA PIHAK YANG BERHAK

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, telah dilaksanakan penyerahan Ganti Kerugian dalam
bentuk saham dari(Instansi yang memerlukan tanah) kepada Pihak
yang Berhak, sesuai validasi nomor: tanggal: dari Ketua
Pelaksana Pengadaan tanah

Dengan daftar Pihak yang Berhak dan saham sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan Luas Tanah yang Dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Nilai/ Lembar Saham	Ket.
1						
2						
dst.						

Demikian Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk saham ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

..... (Instansi yang memerlukan tanah)

ttd.

1.

ttd.

ttd.

.....

2.

3. dst.....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN	
NOMOR	ASLI
Sudah terima dari : (<i>Instansi yang memerlukan tanah</i>)	
Dalam bentuk :	
I. Uang senilai Rp..... (.....)	
II. Tanah pengganti:	
1. letak/lokasi :	
a. desa/kelurahan :	
b. kecamatan :	
c. kabupaten/kota :	
d. provinsi :	
2. luas :	 m ² (..... meter persegi)
3. batas-batas :	
a. Utara :	
b. Timur :	
c. selatan :	
d. barat :	
III. permukiman kembali :	
1. letak/lokasi :	
a. desa/kelurahan :	
b. kecamatan :	
c. kabupaten/kota :	
d. provinsi :	
2. luas :	 m ² (..... meter persegi)
3. batas-batas :	
a. Utara :	
b. Timur :	
c. selatan :	
d. barat :	
IV. Saham sebesar (nilai/lembar saham)	
Untuk pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif seluas m ² yang senilai dengan Rp.(terbilang)	
..., tanggal ... bulan ... tahun ...	
Materai Cukup	ttd
Pihak yang Berhak	

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk
lain, Pengadaan Tanah
..... yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.
b.
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.
b.
c.dst.
Kecamatan.....dst.

Ganti Kerugian dalam bentuk lain dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. Urut	Alamat	Bentuk Ganti Kerugian				Ket.
				Uang (%)	Tanah Pengganti (%)	Permukiman Kembali (%)	Kepemilikan Saham (%)	
1	Ujang	281	Bojong	50	-	50	-	
2	Asep	324	Cisarua	-	40	-	60	
dst.								

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain
ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

ttd.

..... (Instansi yang
memerlukan tanah)

1.

Cap dan ttd.

ttd.

.....
NIP.

2.

3. dst.....

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

SURAT PERMOHONAN

....., tanggal, bulan tahun

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal :

Yth. Kepala Kantor Pajak
di

Sehubungan dengan adanya kegiatan Pengadaan Tanah
....., dimohon kesediaan Saudara
untuk memberikan informasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Tanah
yang berlokasi di:

Nomor Objek Pajak :
Jalan :
RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,
Cap dan ttd.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian dalam
keadaan khusus, Pengadaan Tanah
..... yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

bahwa sudah diberikan ganti kerugian sebesar 25 (dua puluh lima)
persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek
Pajak tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar nominatif	Lokasi dan Luas Tanah yang akan Dilepaskan	Jumlah Uang (Rp)	Ket.
1					
2					
dst.					

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan
khusus ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak

..... (Instansi yang
memerlukan tanah)

ttd.

1.

Cap dan ttd.

ttd.

.....
NIP.

2.

3. dst.....

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, telah dilaksanakan pemberian sisa ganti kerugian dalam
keadaan khusus, Pengadaan Tanah
..... yang berlokasi di:

a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan Luas Tanah yang Dilepasakan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Jumlah Uang Muka (Rp)	Jumlah Sisa Uang Ganti kerugian (Rp)	Ket.
1							
2							
dst.							

3. dst.....

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PIHAK YANG BERHAK MENOLAK BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI
KERUGIAN BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH DAN TIDAK MENGAJUKAN
KEBERATAN KE PENGADILAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....
2. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....dst.

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1							
2							
dst.							

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan.

Berdasarkan penolakan Pihak yang Berhak tersebut, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PIHAK YANG BERHAK MENOLAK BENTUK DAN/ATAU BESARNYA
GANTI KERUGIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/
MAHKAMAH AGUNG YANG TELAH MEMPEROLEH
KEKUATAN HUKUM TETAP

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.
b.
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.
b.
c.dst.
Kecamatan.....dst.

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1							
2							
dst.							

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1							
2							
dst.							

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PIHAK YANG BERHAK TELAH DIUNDANG SECARA PATUT TIDAK HADIR DAN
TIDAK MEMBERIKAN KUASA
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1							
2							
dst.							

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN
SEDANG MENJADI OBJEK PERKARA DI PENGADILAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

- 1. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....
- 2. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....dst.

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1							
2							
dst.							

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN
MASIH DIPERSENGKETAKAN KEPEMILIKANNYA

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....
2. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....dst.



Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1							
2							
dst.							

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN
DILETAKAN SITA OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1							
2							
dst.							

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakan sita oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN
MENJADI JAMINAN DI BANK ATAU JAMINAN HUTANG LAINNYA

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1							
2							
dst.							

telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PENITIPAN GANTI KERUGIAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:
a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:
a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

telah dititipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri
dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Alasan Permohonan Penitipan Ganti Kerugian	Ket.
1					
2					
dst.					

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Ketua Pengadilan Negeri/
Pejabat yang ditunjuk

Yang menitipkan,
Instansi yang memerlukan tanah

Cap dan ttd.

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXX
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
DAFTAR PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

telah melepaskan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah dengan menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan Luas Tanah yang di Lepaskan	No. Dan Tanggal Berita Acara Pelepasan Hak	Bukti Penguasaan/ Kepemilikan	Ket.
1						
2						
dst.						

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
DAFTAR PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH
YANG DITITIPKAN DI PENGADILAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

telah dilepaskan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga bukti-bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, terhadap Objek Pengadaan Tanah dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan Luas Tanah yang di Lepaskan	Bukti Penguasaan/ Kepemilikan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Dasar Penitipan Ganti Kerugian	Ket
1							
2							
dst.							

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pertanahan
Kab/Kota

Cap dan ttd.

.....
NIP.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH
YANG MERUPAKAN MILIK ATAU DIKUASAI PEMERINTAH/BADAN USAHA
MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun, hadir dihadapan saya(nama) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nama Pimpinan Instansi/ :

Pejabat yang Ditunjuk

Jabatan :

Alamat Kantor :

Bertindak untuk dan atas nama (nama Instansi) Selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak atas sebidang tanah luasm², terletak di desa/kelurahan, kecamatan ..., kabupaten/kota ..., provinsi ...

Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas obyek pengadaan tanah (terlampir) kepada pelaksana pengadaan tanah, dan telah menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp...../Tanah Pengganti...../Permukiman Kembali /Kepemilikan Saham

Sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin bahwa:

- atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara;
- tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan/tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun;
- tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan
- tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut.

Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/pelepasan hak ini.

Demikian pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat hapusnya hak dalam Buku
Tanah dan daftar umum lainnya
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

Cap dan ttd.

.....
NIP

Pihak yang Berhak



Cap dan ttd.

.....

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
DAFTAR PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH
YANG MERUPAKAN MILIK ATAU DIKUASAI PEMERINTAH/BADAN USAHA
MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
b.,
c.dst.
Kecamatan.....dst.

telah melepaskan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah dengan
menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan
tanah, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan Luas Tanah yang di Lepaskan	No. dan Tanggal Berita Acara Pelepasan Hak	Bukti Penguasa an/ Kepemili kan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Ket.
1							
2							
dst.							

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM

....., tanggal.... bulan.... tahun.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum

Yth. (Pihak yang Berhak)
..... (No Urut Daftar Nominatif)
di
..... (Alamat)

Bersama ini diberitahukan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa telah diputuskan hubungan hukum antara (Pihak Yang Berhak) dengan (Obyek Pengadaan Tanah), seluas m² sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah nomor NIB dengan penguasaan dan/atau kepemilikan dengan bukti kepemilikan nomor tanggal yang berlokasi di desa/kelurahan....., kecamatan kabupaten/kota dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/kepemilikan Obyek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

Tembusan :
..... (Instansi yang memerlukan tanah)

Tanda terima
..... (Pihak Yang Berhak/kuasa/Kepala Desa/Lurah)

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM TERHADAP ASET
PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN
USAHA MILIK DAERAH/KAS DESA

....., tanggal.... bulan.... tahun.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum

Yth. (Pihak yang Berhak)
..... (No Urut Daftar Nominatif)
di
..... (Alamat)

Bersama ini diberitahukan berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa telah diputuskan hubungan hukum antara (Pihak Yang Berhak) dengan (Obyek Pengadaan Tanah), seluas m² sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah nomor NIB dengan penguasaan dan/atau kepemilikan dengan bukti nomor tanggal yang berlokasi di desa/kelurahan....., kecamatan kabupaten/kota dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/kepemilikan Obyek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

.....
NIP.

Tembusan :
..... (Instansi yang memerlukan tanah)

Tanda terima
..... (Pihak Yang Berhak/kuasa/Kepala Desa/Lurah)

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:

- a.,
 - b.,
 - c.dst.
- Kecamatan.....

2. Desa/Kelurahan:

- a.,
 - b.,
 - c.dst.
- Kecamatan.....dst.

dengan ini menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada (*Instansi yang memerlukan tanah*) sebagaimana terlampir, dengan perincian sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Instansi yang memerlukan tanah

Yang menyerahkan,
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Cap dan ttd.

Cap dan ttd.

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN

....., tanggal bulan tahun

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pengambilan Ganti Kerugian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
.....
di
.....

Bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Penetapan
Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang
Penitipan Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah
yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....
2. Desa/Kelurahan:
 - a.,
 - b.,
 - c.dst.Kecamatan.....dst.

Telah dititipkan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri
yang Bapak/Ibu pimpin (bukti terlampir).

Sehubungan telah selesainya persoalan hukum yang mengakibatkan
Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri bagi Pihak yang
Berhak dibawah ini dengan bentuk penyelesaian (bukti terlampir):

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Lokasi dan Luas Tanah	Jumlah Uang yang dititipkan (Rp.)	Bentuk Penyelesaian
1						
2						
dst.						

Oleh karena itu, mohon kiranya dapat memberikan Ganti
Kerugian yang dititipkan pada Pengadilan Negeri yang
Bapak/Ibu pimpin, kepada Pihak yang Berhak yang telah selesai persoalan
hukumnya yang namanya tercantum di atas.

Demikian ...

